

Judul : Pembahasan RUU Penyiaran, baleg tambah anggota KPI
Tanggal : Rabu, 26 Agustus 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 9

Pembahasan RUU Penyiaran Baleg Tambah Anggota KPI

FOTO: IG PRIBADI



Dave Laksono

KOMISI I DPR mengusulkan perubahan jumlah anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pusat dan daerah dalam pembahasan RUU Penyiaran. Jumlah anggota tingkat pusat mengalami penambahan dari 9 jadi 11 orang. Sedangkan keanggotaan tingkat daerah diusulkan berkurang dari 7 jadi 5 orang.

Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menjelaskan, komposisi 11 anggota itu terdiri atas tujuh perwakilan usulan DPR, satu dari Pemerintah, satu masyarakat, satu lembaga penyiaran, serta satu kalangan akademisi. Nantinya, aturan mengenai Panitia Seleksi (Pansel) dan hal terkait diatur dalam Pasal 10 RUU Penyiaran.

Dia menyebut, perubahan keanggotaan dari sembilan jadi 11 di tingkat pusat, dirancang demi mengayomi seluruh pemangku kepentingan sektor penyiaran. "Pembagian porsi perwakilan itu disusun agar KPI bisa melakukan pengawasan terhadap semua pemangku kepentingan," terang Dave, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2025).

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Putra Nababan menilai, penambahan jumlah

anggota KPI Pusat menjadi 11 terkait erat dengan perluasan pengawasan. Tugas lembaga itu kini tidak hanya mengawasi televisi dan radio, tapi juga ranah digital serta siaran langsung.

Karena itu, perluasan ruang lingkup pengawasan dibutuhkan karena banyak media serta konten digital belum terjangkau aturan KPI. Lembaga pengawas kesulitan mengontrol media baru tanpa dasar hukum yang jelas. Untuk itulah DPR memasukkan ranah digital ke dalam RUU Penyiaran, demi menjaga kedaulatan informasi nasional secara menyeluruh.

Selanjutnya, kepastian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam UU bakal memperkuat peran pengawasan di lapangan. Persetujuan atas perluasan wewenang itu tetap diberikan meski ada rekam jejak sanksi masa lalu. "Penataan aturan hukum memberi kejelasan bagi cakupan kerja lembaga pengawas yang sangat luas," terangnya.

Tingginya jumlah pengguna medsos di Indonesia, sambung Putra, juga jadi alasan penguatan pengawasan ruang digital. Penetapan 11 anggota dirancang mengawasi media digital demi melindungi masyarakat dari infiltrasi konten negatif. Kebijakan ini berfokus pada perluasan cakupan tugas pengawasan, bukan sekadar urusan anggaran belanja.

Dia menegaskan, penambahan anggota KPI Pusat bukan semata-mata persoalan anggaran belanja. Kebijakan itu berkaitan dengan kehendak pembentuk UU untuk memperluas tugas serta kewenangan lembaga pengawas. Langkah penyesuaian ini diambil untuk mengimbangi perkembangan pesat di sektor teknologi informasi dan komunikasi nasional saat ini. ■ PYB